Permasalahan Buruh Migran Indonesia pada Sektor Publik

Indonesian Migrant Workers Problem in Public Sector

Syamsuddin¹ dan Gunadi Setyo Utomo²

(1) Panti Sosial Tresna Werdha Gao Mabaji Gowa Jl. Poros Malimo Km 29 Samaya Kab. Gowa Sulsel
Telpon 085242682979 email: syamsuddigido@yahoo.co.id

(2) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Jl Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta Telpon (0274) 377265 – 373530, 085228147528
email: gunadibpks@yahoo.co.id. Diterima 29 Februari 2016, diperbaiki 15 Agustus 2016, disetujui 29 Agustus 2016.

Abstract

This study meant to identify problems faced by Indonesian migrant workers in public sector in Penang Island, Malaysia. Data gathered through closed and opened questionnaires that 77 randomly chosen among migrant workers working in public sector in Penang. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique, related to migrant workers right that finally their problem can be concluded. The result showed that problems faced by migrant workers in Penang Island were about training, accomodation, debt bandage, wage and overhour, health service and work-leave, violence, and work hour. It recommended that the Ministry of Social Affairs can improve its supervision on menpower service institution in implementing replacement process as regulated, sort of giving initial training before they go to work. Would-be migrant workers need to be given more comprehensive understanding on right and obligation as migrant workers and get information chanel for complaining if they are treated in behaviour that violate their right, and get guidance and advocation form Indonesian representative. In General Consulate of Republic of Indonesian, Penang needed social attache with international licenced professional social worker that help migrant worker facing problem.

Keywords: *migrant workers; Indonesian; public sector*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi buruh migran Indonesia (BMI) pada sektor publik di Pulau Pinang Malaysia. Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 77 orang responden dipilih secara acak, bekerja pada sektor publik di Penang, Malaysia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif terkait hak-hak buruh migran untuk ditarik kesimpulan terkait beberapa masalah yang dialami BMI. Hasil penelitian menunjukkan beberapa masalah yang dihadapi BMI sektor publik di Pulau Pinang, seperti masalah terkait dengan pelatihan, penampungan dan beban hutang, gaji dan lembur, pelayanan kesehatan dan cuti, kekerasan, serta jam kerja. Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Sosial dapat meningkatkan pengawasan kepada setiap PJTKI dalam melaksanakan proses penyaluran BMI mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti pemberian pelatihan sebelum diberangkatkan. Calon BMI perlu diberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran dan mendapat saluran informasi pengaduan jika mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-hak mereka, serta mendapatkan pendampingan dan pembelaan dari perwakilan Indonesia. Di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, perlu dibuka atase sosial yang menugaskan pekerja sosial profesional dengan lisensi internasional yang dapat membantu BMI ketika menghadapi permasalahan

Kata Kunci: **pekerja migran; Indonesia; sektor publik**

A. Pendahuluan

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan adalah melalui pengiriman tenaga kerja atau buruh ke luar negeri. Beberapa negara yang

menjadi tujuan utama pengiriman Buruh Migran Indonesia (BMI) seperti Kuwait, Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan Arab Saudi. Pertumbuhan pengiriman BMI sangat pesat, dari 500 kabupaten di Indonesia terdapat 392 merupakan pengirim BMI, hampir seluruh kabupaten di

Indonesia merupakan pengirim BMI (Nurhayat, 2013). Jumhur Hidayat, mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia, menyatakan terdapat 6,5 juta BMI yang bekerja di 142 negara. Tahun 2014, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNPTKI) mencatat 429.872 penempatan BMI dengan komposisi 56 persen bekerja pada sektor formal atau sektor publik dan sisanya bekerja disektor informal atau domestik (Humas BNP2TKI, 2015).

Sebagian besar BMI menjadi buruh paksa dan terikat hutang (*debt bondage*) di negara-negara Asia dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Syria dan Iraq. Diperkirakan, terdapat 6,5 juta sampai 9 juta orang pekerja Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah, 69 persen di antaranya perempuan (Department of State, United States of America, 2011). Hal ini diperkuat oleh Piper (2005), Indonesia merupakan pengirim buruh migran, baik sebagai pembantu rumah tangga maupun sebagai pekerja bangunan (*construction*). Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan ini sebagai usaha untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sayangnya, kebijakan ini belum disertai dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap BMI. Huling (2012) berpendapat, pemerintah Indonesia kurang memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja di luar negeri. Menurutnya, pemerintah Indonesia seharusnya melakukan revitalisasi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan sehingga dapat menyiapkan pekerja yang lebih baik. BMI sering mengalami kekerasan dan eksploitasi, mulai dari proses rekrutmen, penerbitan dokumen, semasa perjalanan, semasa berada di tempat penampungan menunggu penyaluran, dan lebih lagi ketika menjalani tugasnya sebagai BMI di negara tujuan (Raymond, Cunha, dan Dzuhayatin, 2002).

Faktor-faktor yang menyebabkan BMI mengalami masalah ketika bekerja di luar negeri antara lain karena kurang memadainya pelatihan dan informasi yang diberikan, pemalsuan doku-

men, kurangnya kesiapan diri, baik dari segi mental maupun bahasa (Huling, 2012). Selain itu, kekurangan pengetahuan dan keterampilan BMI seringkali dimanfaatkan agen dan jaringannya untuk meraup keuntungan yang sebanyak mungkin dengan mengeksploitasi BMI melalui kerja paksa (Piper, 2005).

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Langlang Buana Bandung pada tahun 2002, mengidentifikasi beberapa masalah yang dialami oleh BMI di Arab Saudi, yaitu proses rekrutmen, pemalsuan dokumen, pelatihan, keterlibatan calo, pelanggaran prosedur pengiriman oleh agen PJTKI, pengawasan yang lemah terhadap PJTKI, adanya jaringan kriminal yang dimainkan oleh agen, calo, dan oknum pegawai pemerintah (Sutaat dkk., 2011). Pekerja wanita sering menghadapi berbagai kasus seperti eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi dan tindakan kekerasan. Bentuk penganiayaan sudah sering dialami oleh BMI, seperti tidak mendapat gaji ataupun gaji mereka dipotong untuk pembiayaan perjalanan (Piper, 2005). Kelemahan wanita sering dimanfaatkan oleh agen atau jaringannya dengan cara menipu atau memaksa, terdapat beberapa kasus wanita miskin dijual ke dalam pelacuran. Setelah mereka terjebak dan berada di negara asing, mereka tidak dapat bertutur bahasa asing, kebanyakan wanita ini dipaksa bekerja dengan beban kerja yang berat dan waktu kerja yang panjang, serta diberi tempat tinggal yang kotor dan tidak sehat. Mereka juga mengalami perlakuan kekerasan, pengucilan, dibebani hutang, denda, mengalami pelecehan seksual, pengurangan bahkan tidak mendapat bayaran sama sekali (Lynda dan Celia, 2006).

BNPTKI tahun 2014 mencatat, bahwa dari 200-400 ribu BMI yang pulang ke Indonesia terdapat 5-15 persen yang bermasalah. Jenis permasalahan yang dialami seperti, masalah legalitas pemberangkatan, korban kekerasan atau konflik dengan majikan, pelecehan seksual, dan penggajian. Kementerian Luar Negeri mencatat, bahwa dari tanggal 1 Januari – 30 September 2014, terdapat beberapa jenis kasus yang dia-

lami oleh BMI di luar negeri, yakni sebanyak 1.785 kasus berkaitan dengan ketenagakerjaan (gaji, kecelakaan kerja, beban kerja yang berat, PHK), sebanyak 6.610 kasus berkaitan dengan urusan keimigrasian (*overstay*, penyalahgunaan visa), dan sebanyak 23 kasus perdata (perceraian, perebutan hak asuh anak). Kasus lain seperti pidana (narkoba, pembunuhan, perampokan, perdagangan manusia, dan lain-lain) 816 orang, (hilang kontak, meninggal dunia, sakit, bencana alam kerusuhan politik dan lain lain) 2.273 kasus (Mulyana dan Marjuki, 2015).

Sebuah survei di Cina untuk buruh migran di sektor publik, seperti pekerja di bidang perkebunan, mekanik menemukan, bahwa legitimasi hak dan minat pekerja sering dilanggar oleh majikan atau perusahaan. Masalah tersebut termasuk kurangnya perlindungan kepada buruh, gaji perempuan yang lebih rendah, dan penundaan pembayaran gaji (*Tian, 2011*).

Ada anggapan bahwa pekerja domestik sering mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa pekerja di sektor publik juga tidak terlepas dari masalah eksploitasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh BMI di sektor publik atau formal di Pulau Penang Malaysia. Sektor publik yang dimaksud dalam kajian ini meliputi bidang

pekerjaan yang dijalankan pada sektor non-domestik, seperti bidang industri dan konstruksi (bangunan).

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BMI sektor publik di Pulau Penang Malaysia (Martono, 2015). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 77 responden yang dipilih secara acak. Mereka adalah BMI yang bekerja di pabrik, bangunan, atau restoran di Penang, Malaysia. Data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dikaitkan dengan konsep ataupun aturan tentang hak-hak buruh migran sehingga dapat ditarik satu kesimpulan mengenai masalah-masalah BMI dan memberikan masukan kepada Kementerian Sosial untuk lebih meningkatkan pelayanan di sektor ketenagakerjaan.

C. Kondisi dan Permasalahan Buruh Migran Indonesia

Sebelum membahas berbagai permasalahan BMI, berikut dideskripsikan karakteristik BMI yang menjadi responden penelitian ini. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan usia dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	<i>f</i>	%	Pendidikan	<i>f</i>	%	Perkawinan	<i>f</i>	%	Usia	<i>f</i>	%
L	21	27,3	SD	4	5,2	B.kawin	66	85,7	18-25	55	71,4
P	56	72,7	SMP	9	11,7	Kawin	7	9,1	26-35	20	26,0
			SMK	40	51,9	Janda/duda	4	5,2	>35	2	2,6
			SMA	24	31,2						
Jumlah	77	100		77	100		77	100		77	100

Sumber: Jawaban Responden

Tabel 1 menunjukkan, umumnya responden berjenis kelamin perempuan 72,7 persen dengan latar belakang pendidikan umumnya sekolah menengah kejuruan 51,9 persen dan pendidikan SMA 31,2 persen. Umumnya re-

sponden belum menikah 85,7 persen. Responden umumnya berada pada usia 18-25 tahun 71,4 persen. Tingginya jumlah perempuan yang menjadi BMI memperkuat anggapan bahwa terjadi proses feminisasi dalam sektor pengiri-

man BMI. Perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan eksploitasi dan dikorbankan. Oleh karena itu, pemerintah mestinya meningkatkan upaya perlindungan kepada BMI, terutama kepada perempuan. Berdasarkan pendidikan yang mayoritas lulusan

SMA menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan BMI cukup memadai, walaupun masih ada yang lulusan SD dan SMP. Kondisi asal daerah, jenis pekerjaan dan masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Daerah, Jenis Pekerjaan dan Masa Kerja

No	Asal	f	%	Jenis Pekerjaan	f	%	Lama bekerja (tahun)	f	%
1	Jawa timur	7	9,1	Operator	62	80,5	0-2	59	76,7
2	Jawa Tengah	24	31,2	Gudang	4	5,2	3-5	11	14,3
3	Jawa Barat	23	29,9	Quality Control	5	6,5	6-7	7	9,1
4	Sumatera Utara	14	18,2	Pelayan	1	1,3			
5	Yogyakarta	3	3,9	Buruh Bangunan	5	6,5			
6	Banten	3	3,9						
7	Sumatera barat	1	1,3						
8	Jakarta	2	2,6						
Jumlah		77	100		77	100		77	100

Sumber: Jawaban Responden

Berdasarkan asal daerah, responden umumnya berasal dari Jawa Tengah 31,2 persen dan Jawa Barat yakni 29,9 persen yang lainnya berasal dari Sumatera Utara, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Jakarta dan Sumatera Barat. Berdasarkan jenis pekerjaan, responden umumnya adalah sebagai operator 80,5 persen, posisi yang lain adalah sebagai petugas gudang, *quality control*, pelayan dan sebagai buruh. Umumnya responden bekerja antar 0-2 tahun yakni 76,7 persen dan 3-5 tahun yakni 14,3 persen.

Permasalahan awal yang dialami oleh BMI terkait dengan proses perekrutan yang tidak memenuhi standar prosedural berupa pelatihan yang memadai, baik sebelum diberangkatkan maupun setelah tiba di negara penerima. Dari 77 responden, sebanyak 68,9 persen menyatakan mendapatkan pelatihan, 31,2 persen menyatakan tidak mendapatkan pelatihan sebelum diberangkatkan, 51,9 persen menyatakan mendapatkan pelatihan setelah tiba di Malaysia, dan sisanya 48,1 persen menyatakan tidak mendapatkan pelatihan. Durasi latihan yang diterima sangat tidak memadai, maksimal dua minggu bahkan ada yang hanya satu hari. Materi pelatihan yang

mereka dapatkan seperti, bahasa melayu, bahasa inggris, teknik elektro, komputer, hukum, budaya yang berlaku di Malaysia, tata cara dan prosedur kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, motivasi kerja, tata cara pergaulan termasuk hak dan kewajiban pekerja.

Pelatihan setelah tiba di Malaysia bervariasi, antara dua hari, tiga hari, empat hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dan tiga bulan. Materi yang didapatkan seperti prosedur kerja, tata cara pengoperasian mesin atau alat, keselamatan dan kesehatan kerja peraturan yang harus dipatuhi, serta disiplin kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengarah tenaga kerja tidak memperhatikan aspek kesiapan calon BMI, baik dari aspek keterampilan maupun mentalitas dan budaya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pekerja migran. Calon BMI kurang diberi pemahaman tentang hak-hak mereka yang sebenarnya, untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk eksploitasi baik, secara hukum nasional maupun internasional. Hal ini diakui oleh Huling (2012) bahwa pekerja tidak pernah dipersiapkan, baik secara mental maupun keterampilan. Mereka tidak memiliki pengetahuan ataupun akses ter-

hadap lembaga-lembaga yang dapat menolong dalam keadaan darurat apabila mengalami eksploitasi.

Pelaku (majikan ataupun agen) berusaha untuk membatasi ruang gerak pekerja berhubungan dengan pihak-pihak konsulat jenderal ataupun kedutaan besar. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah memberi informasi yang salah mengenai fungsi dan peran lembaga perwakilan kepada BMI, sebagai lembaga yang dapat menghukum mereka jika tertangkap, bahkan ketika mereka terpaksa harus berurusan dengan lembaga resmi untuk perpanjangan paspor, agen ataupun majikan akan menggunakan ancaman untuk tidak memberi informasi mengenai eksploitasi atau kekerasan yang mereka alami. Hal ini diperkuat dengan pendapat Healy (2008), bahwa pelaku berusaha mencegah korban untuk mendapat pertolongan dengan menggunakan ancaman, seperti akan dilaporkan kepada polisi atau kantor imigrasi sebagai pendatang ilegal atau diancam dengan kekerasan.

Permasalahan lain yang dialami BMI adalah adanya eksploitasi secara ekonomi, sebelum mereka diberangkatkan ke Malaysia telah dibebani dengan sejumlah utang. Responden umumnya (62 persen) diharuskan membayar sejumlah uang berkisar antara Rp 2.5000.000,- sampai Rp 8.500.000,-. Uang tersebut disyaratkan oleh agen yang membantu mereka untuk menghubungkan dengan jaringan sesama agen di Malaysia, ada juga pekerja yang membayar jasa kepada calo. Kebanyakan responden juga dibebani utang saat tinggal di penampungan, yakni sebanyak 59 orang (77 persen). Lama penampungannya bervariasi, antara satu hari hingga tiga bulan. Umumnya, responden mengaku bahwa kondisi penampungan tidak layak huni seperti air tidak bersih, sempit, berdesak-desakan, berdebu, banyak nyamuk, tidak ada tempat tidur, sehingga harus tidur di lantai dengan tikar, ada yang tidur tanpa alas, tidak ada tempat ibadah (surau), termasuk tidak ada toilet, walaupun ada jumlahnya tidak memadai untuk melayani BMI yang jumlahnya ratusan orang, kadang tidak ada lampu, kotor, seram, bahkan ada yang mengaku

ditempatkan di gudang. Beberapa responden bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, yakni diperlakukan seperti seorang budak. Kondisi penampungan yang tidak layak tidak saja mereka rasakan di Indonesia, 11 orang (14 persen) responden menyatakan, bahwa ketika mereka tiba di Malaysia pun masih mendapat kondisi penampungan yang tidak layak, seperti kotor, kumuh, tidak dapat makan, tidak dapat tempat tidur, kamar mandi banjir (buruk), tidur dilantai, sesak, dikurung dan tidak bisa ke mana-mana, tidak ada tempat ibadah, tidak ada kamar dan kasur, atau kondisinya seperti dalam penjara, bahkan ada penampungan yang tidak memiliki kamar mandi, tidak ada air bersih sehingga harus minum air keran atau air mentah.

Dari 59 orang yang ditampung sebelum berangkat, 26 orang (44 persen) mengaku dibebani utang selama di penampungan ketika tiba di Malaysia. Besaran utang yang harus mereka bayar melalui pemotongan gaji kepada agen berkisar antara RM. 200-3500 (Rp 700.000,- – Rp 12.250.000,-). Kondisi ini sesuai dengan hasil kajian dari *Department of State, United States of America* (2011) dan Huling (2012) bahwa ada PJTKI yang bekerjasama dengan sindikat perdagangan manusia. Akibatnya, baik pekerja wanita maupun laki-laki terjatuh ke dalam ikatan utang dan perbudakan. Calo seringkali bekerja di luar peraturan undang-undang dan menjalin hubungan dengan oknum pemerintah dan polisi agar bisa terbebas dari jeratan pelanggaran undang-undang yang dilakukannya. PJTKI mengurung pekerja selama berbulan-bulan dalam sebuah rumah penampungan (*shelter*) sebelum mereka diantar bekerja, ini menyebabkan mereka terjatuh dengan hutang. Pihak perusahaan, baik yang berizin maupun yang tidak sering menggunakan ikatan hutang, penahanan dokumen, ancaman kekerasan, dan pengurungan dalam jangka waktu yang lama untuk memaksa BMI tetap berada dalam keadaan kerja paksa.

Terkait masalah gaji dan jam kerja BMI di Penang Malaysia, sebanyak 22 persen responden menyatakan tidak langsung mendapatkan gaji pertama setelah sebulan bekerja, selebihnya yak-

ni 78 persen responden menyatakan menerima gaji pertama setelah satu bulan kerja. Responden yang tertunda gajinya mengaku digaji setelah bulan ke dua atau bulan ke tiga bekerja. Terkait jam kerja, umumnya responden menjawab bahwa mereka bekerja lebih dari delapan jam, yakni 70 orang (91 persen) sementara hanya tujuh orang (9 persen) yang mengaku bekerja selama delapan jam. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka umumnya bekerja 12 jam sehari sebagai jam kerja normal. Terdapat 62 orang (80,5 persen) yang menyatakan bahwa mereka mendapat upah kerja *overtime* (OT=lembur), sementara yang lain, 15 orang (19,5 persen) menyatakan, bahwa mereka tidak mendapatkan upah atas kelebihan jam kerja. Masalah lain terkait dengan upah kerja *OT*, dari 62 responden yang mendapatkan upah *OT*, 31persen menyatakan upah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara yang lain, 43 orang (69 persen) menyatakan bahwa pembayaran upah *OT* sesuai.

Bekerja lebih dari delapan jam tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan standar kerja yang berlaku secara global. Hal ini juga melanggar ketentuan yang berlaku di Malaysia, bahwa durasi jam kerja adalah delapan jam dan apabila bekerja lebih dari itu maka berhak atas upah tambahan sesuai dengan ketentuan. Beberapa responden menyatakan, bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pekerja lokal yang hanya diwajibkan bekerja selama delapan jam sehari.

Penundaan gaji merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh pekerja migran. Kajian yang dijalankan oleh Astuti dan kawan-kawan (2000) menemukan, bahwa banyak pekerja migran yang tidak dibayar gaji selama beberapa bulan. Majikan sering menahan gaji pekerja sampai mereka akan kembali ke negara asal atau setelah pekerja meminta atau memaksakan pembayaran gajinya, semestinya gaji pekerja dibayarkan tiap-tiap bulan sebagai hak dasar seorang pekerja. Laporan *Human Right Watch* mengemukakan alasan serupa, bahwa majikan sengaja menangguhkan pembayaran

gaji sampai dengan akhir masa kontrak agar dapat membayarkan gaji yang lebih rendah dari yang seharusnya diterima pekerja. Kondisi ini dimungkinkan, sebab pekerja yang umumnya pendidikan rendah tidak mampu menghitung jumlah gaji secara keseluruhan selama masa kontrak dalam satu atau dua tahun (Help Wanted, 2014), merupakan satu indikasi bahwa pekerja tidak menyadari hak-haknya sejak awal. Jika mereka memiliki kesadaran dari awal bahwa gaji seharusnya dibayar setiap bulan, kemungkinan mereka akan lebih cepat mengambil keputusan untuk berhenti bekerja daripada harus mempercayai janji-janji majikannya. Kesadaran pekerja mengenai hak atas gaji dapat mencegah mereka dari keadaan eksploitasi dan segera keluar untuk mendapatkan pertolongan.

Terkait masalah kesehatan, umumnya responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan layanan kesehatan 68 orang (88 persen) sisanya 9 orang (12 persen) menyatakan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, baik dari agen maupun perusahaan. Layanan kesehatan yang mereka terima umumnya berasal dari klinik, yang bekerja sama dengan perusahaan atau agen dan atau rumah sakit. Terkait dengan hak libur, BMI 62 orang (80,5 persen) mendapat hak libur mingguan, sisanya 15 orang (19,5 persen) tidak mendapatkan libur mingguan. Terkait dengan libur tahunan, terdapat 13 orang (17 persen) tidak mendapatkan libur tahunan, dan hanya 64 orang (83 persen) yang mendapatkan libur tahunan. Dari 64 orang yang mendapatkan libur tahunan tersebut hanya 10 orang (16 persen) yang mendapatkan uang tiket untuk berlibur sementara 84 orang (54 persen) menyatakan tidak mendapatkan uang tiket.

Umumnya responden menyatakan tidak pernah mendapatkan kekerasan, hanya ada tiga responden yang menjawab, bahwa mereka pernah mendapatkan kekerasan secara verbal seperti hinaan, cacian bersifat rasis seperti “kamu orang Indonesia seperti orang yang tak punya harga diri”, pelakunya adalah majikan dan teman kerja responden. Terkait dengan pelecehan seksual, semua menjawab bahwa mereka tidak pernah

mendapatkan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

Paspor yang dikuasai oleh majikan atau agen merupakan masalah yang sangat serius yang dialami oleh BMI di Malaysia. Umumnya responden (92 persen) tidak memegang sendiri paspornya, dalam penguasaan majikan (29,5 persen) dan agen (70,5 persen). Berdasarkan pengakuan responden terdapat berbagai alasan paspor BMI dipegang majikan atau agen, seperti demi keamanan agar paspor tersebut tidak hilang, sebagai jaminan agar pekerja tidak melarikan diri sebelum habis masa kontrak, takut paspor disalahgunakan mencari majikan atau perusahaan lain. Responden lain memberikan alasan bahwa paspor tersebut sementara digunakan untuk mengurus permit pekerja, terikat utang dengan majikan atau perusahaan. Ada pula yang mengemukakan alasan, bahwa hal tersebut sudah menjadi ketentuan perusahaan. Alasan praktis misalnya, jika terdapat hal-hal penting terkait dengan pekerja maka paspor tersebut dapat segera diselesaikan tanpa harus menghubungi pekerja.

Terdapat sembilan responden (13 persen) pernah mengalami masalah akibat tidak membawa paspor asli. Masalah tersebut seperti, BMI ditahan oleh polisi selama satu minggu, bahkan mendapatkan siksaan. Ada pula yang menggunakan bentuk negosiasi dengan cara menyuap polisi RM 50 (Rp 170.000,-). Hal ini seperti diungkapkan beberapa responden berikut.

“Ditangkap polisi, ditahan 1 minggu, disiksa dibalai polisi, saya coba laporkan hal ini balik ke polisi tetapi hasilnya nol, juga buat laporan ke KJRI, tetapi KJRI melempeng, haruskah bapak-ibu di KJRI rela Indonesia diinjak-injak” responden lain mengungkapkan sebagai berikut “Setiap kali *road block* di jalan raya, ditahan, ditanyakan paspor, jika tidak ada, maka harus bersedia dibawa ke balai polisi, kalau tidak kami harus membayar sejumlah uang”, responden yang lain juga mengungkapkan, “hampir ditangkap polisi, salah bawa foto *copy* paspor, 50 ringgit melayang.”

Terkait dengan hak penguasaan paspor, umumnya responden tidak tahu bahwa paspor seharusnya mereka sendiri yang pegang, sebagai identitas pribadi seorang imigran, yakni 54 orang (70 persen) sedangkan yang menyadari bahwa paspor seharusnya disimpan sendiri 23 orang (30 persen). Hal ini menunjukkan betapa rendahnya pemahaman BMI terkait dengan hak-hak mereka, sehingga dengan mudah di eksploitasi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari keberadaan BMI, antara lain dengan menahan paspor, sehingga diperlukan pemberian pembekalan kepada calon BMI sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri, tentang pentingnya menyimpan atau memegang paspornya sendiri.

D. Penutup

Berdasarkan kajian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang sering dialami oleh pekerja Indonesia di luar negeri yakni, masalah tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, mengalami perlakuan di tempat penampungan yang tidak layak, tidak diberikan kekuasaan untuk menyimpan paspor sendiri sehingga mereka sering mengalami masalah dan berurusan dengan polisi karena tidak dapat menunjukkan paspor asli. Mereka juga masih berhadapan dengan masalah ketiadaan libur, baik libur mingguan maupun libur tahunan, yang mendapatkan libur tahunan tidak diberi hak berupa tiket untuk cuti tahunan. Pekerja mengalami kekerasan walaupun dalam bentuk kekerasan verbal dan jumlahnya tidak begitu signifikan. Beberapa responden juga tidak mendapatkan layanan kesehatan ketika mereka sakit. Mereka juga mengalami masalah jam kerja yang panjang yakni lebih dari 12 jam, sementara ketika mereka bekerja lembur sebagian menyatakan tidak diberi upah lembur, sebagian menyatakan mendapatkan upah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Sosial, khususnya direktorat yang menangani BMI agar dapat meningkatkan pengawasan kepada setiap PJTKI agar dapat melaksanakan proses penyaluran BMI dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti pemberian pelatihan

sebelum diberangkatkan. Calon BMI perlu diberi pemahaman, bahwa paspor tidak boleh dikuasai oleh pihak manapun dengan alasan apapun, sebab paspor merupakan identitas pribadi harus senantiasa dibawa sebagai *foreigner*. Kebijakan lain untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada BMI, maka Kementerian Sosial diharapkan dapat melakukan negosiasi dengan Kementerian Luar Negeri agar dapat membuka atase sosial di Kedutaan Besar Indonesia dan KJRI di seluruh Malaysia, serta menempatkan pekerja sosial profesional dengan lisensi internasional untuk membantu BMI yang mengalami masalah.

Pustaka Acuan

- Department of State, United States of America. (2011). *Trafficking in Persons Report 2011*. Retrieved from <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/>
- Healy, L., M. (2008). *International social work: Professional action in an interdependent world*, (2nd Edition). Oxford: University Press.
- Help Wanted: *Workplace Abuses in Malaysia*, (2014, July 22). Retrieved from Human Right Watch Website, <http://www.hrw.org/node/11993/section/7>
- Huling, A. (2012). Domestic workers in malaysia: Hidden victims of abuse and forced labor. *International Law and Politics*, 44(2), 629-680). Retrieved from <http://connection.ebscohost.com/c/articles/74646207/domestic-workers-malaysia-hidden-victims-abuse-forced-labor>.
- Humas BNP2TKI. (2015, January 16). *Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang*. Retrieved from BNP2TKI Website, <http://www.bnptki.go.id/read/9800/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang.html>
- Lynda, B., & Celia, W. (2006). *Sex trafficking: The global market in women and children* (Book Review) (Vol. 12, pp. 3 - 4): Sage Publication
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, W., & Marjuki. (2015). *Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Melalui Rehabilitasi Psikososial Dan Pemberdayaan Sosial*. Retrived from Kementerian Sosial Republik Indonesia website, <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18580>
- Nurhayat, W. (2013, March 14). Jumlah TKI Capai 6,5 Juta, Tersebar di 142 Negara. *DetikNews*. Retrieved from <http://finance.detik.com/read/2013/03/14/174040/2194313/4/jumlah-tki-capai-65-juta-tersebar-di-142-negara>
- Piper, N. (2005). A Problem by a different name? A review of research on trafficking in South East Asia and Oceania. *International migration*, 43(1 2), 203-233.
- Raymond, J. G., Cunha, J. d., & Dzuhayatin, S. R. (2002). *A comparative study of women trafficked in the migration process: Patterns, profiles and health consequences of sexual exploitation in five countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States)*: Coalition against trafficking in women.
- Srinivasan, Sr. S. & Illango P (2012) A Study on the Problems of Migrant Women Workers In Thuvakudi, Trichy District. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 4 (4) 45-50 retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2389299
- Srinivasan, Sr.S. & Ilango, P. (2013). Occupational health problems of women migrant workers in Thogamalai, Karur District, Tamil Nadu, India. *International Research Journal of Social Sciences*, 2(2), 1-7, retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2389346
- Sutaat, Sri Gati Setiti, Nurdin Widodo, & Nunung Unayah. (2011). *Pendampingan sosial bagi calon pekerja migran dan keluarganya di daerah asal: Studi Masalah dan kebutuhan*. Yogyakarta: P3KS Press.
- Tian, L. (2011, January 13), Survey: *New generation of migrant workers face old problems*. *China Daily* Retrieved from People's Daily online, <http://en.people.cn/90001/90776/90882/7259171.html>